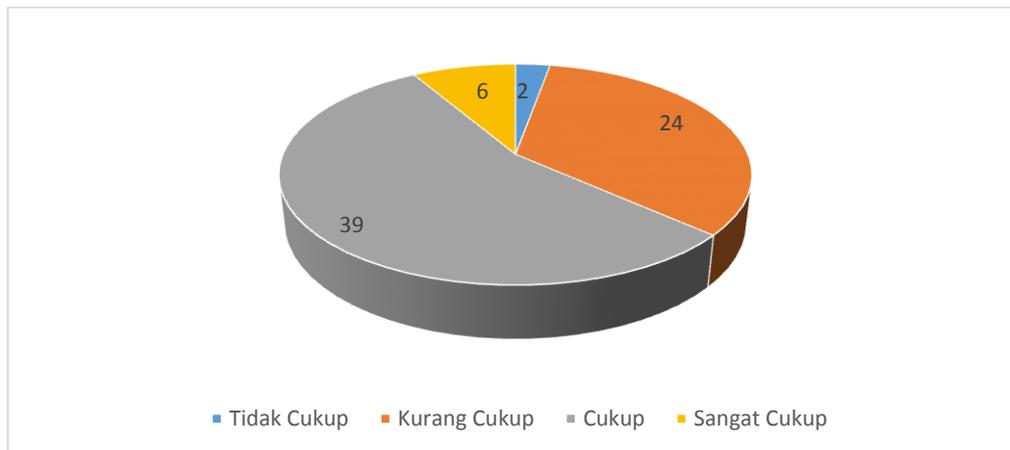


BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Pemanfaatan Dana Desa

Anggaran Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat digunakan untuk berbagai program pembangunan desa sehingga memiliki standar kecukupannya sendiri. Secara keseluruhan, responden terdiri dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparatur Desa, Kepala Dukuh, dan Ketua Rumah Tangga (RT) dengan jumlah responden sebanyak 71 orang. Dalam gambar dibawah dapat dilihat lebih dari masyarakat Desa Tamantirto menyatakan bahwa anggaran yang diberikan dapat dikatakan cukup untuk membiayai program pembangunan desa yang telah disusun sebelumnya.

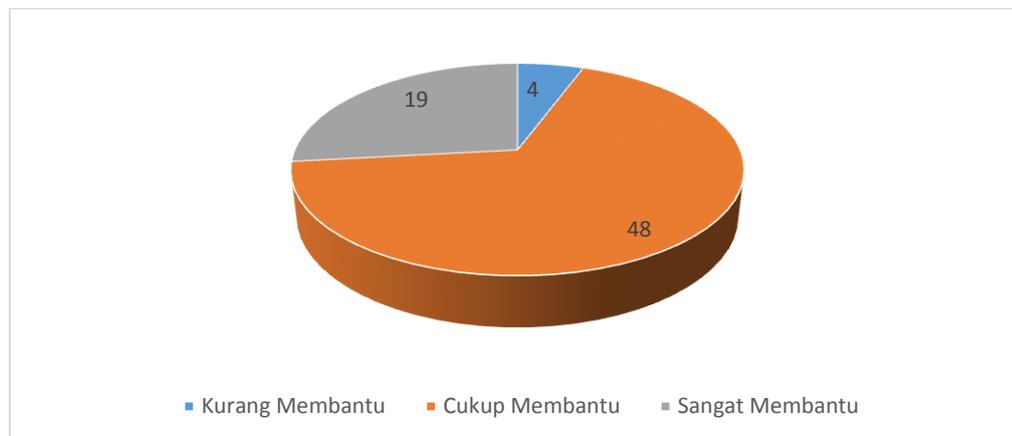


Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Gambar 5.1.
Aspek Kecukupan Pembiayaan Pembangunan

Persepsi responden secara keseluruhan menyatakan bahwa dalam aspek kecukupan untuk pembangunan, mayoritas mengatakan Dana Desa sudah cukup membantu dalam menunjang pembangunan desa. Hal ini dapat dilihat pada gambar 5.1. diatas. Terdapat sebanyak 39 responden menyatakan cukup jika Dana Desa telah menunjang pembangunan desa. Sedangkan terdapat sebanyak 24 responden menyatakan kurang cukup dan 2 responden menyatakan tidak cukup jika Dana Desa telah membantu menunjang pembangunan di desa.

Manfaat Dana Desa pada akhirnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat desa dalam menunjang pembangunan ekonomi desa tersebut, sehingga keberadaan dana desa menjadi anggaran yang penting untuk terus dialokasikan oleh pemerintah pusat.



Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Gambar 5.2.
Pembangunan Terbantu Oleh Dana Desa

Persepsi dari responden berikutnya menyatakan Dana Desa cukup membantu dalam pembiayaan pembangunan ekonomi desa. Hal ini dapat dilihat melalui gambar 5.2. diatas. Terdapat sebanyak 48 responden atau 67,61% dari total populasi responden menyatakan Dana Desa cukup membantu dalam pembangunan desa. Selanjutnya terdapat 19 responden atau 26,76% responden menyatakan sangat membantu. Tetapi masih terdapat 4 responden menyatakan Dana Desa kurang membantu dalam menunjang pembangunan desa.

Tabel 5.1.
Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Dilakukan oleh
Pemerintah Desa Tamantirto Tahun 2017

No	Uraian	Jumlah%
1	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk pengembangan pos kesehatan, polindes, dan posyandu.	6,9
2	Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD seperti TK, Kelompok Bermain).	5,3
3	Pembangunan sarana dan prasarana desa yang mendukung kedaulatan pangan.	4,2
4	Pembangunan sarana dan prasarana desa yang mendukung kedaulatan energi.	0,94
5	Pembangunan sarana dan prasarana desa yang mendukung pembangunan disektor ekonomi.	5,36
6	Pembangunan sarana dan prasarana desa yang mendukung pariwisata dan industri.	4,9
7	Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa.	7,8
8	Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani.	4,8
9	Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan.	6,3
10	Pembangunan dan pemeliharaan air bersih berskala desa.	5,5
11	Pembangunan dan pemeliharaan irigasi.	6,6

Lanjutan **Tabel 5.1.**

12	Pengembangan sarana dan prasarana produksi desa.	7,4
13	Pendirian dan pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).	3,4
14	Pembangunan dan pengelolaan pasar atau kios desa.	4,2
15	Pembangunan dan pengelolaan keramba, jaring apung dan kolam ikan.	5,1
16	Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa.	1,4
17	Pembuatan pupuk dan pakan ternak/ikan.	5,4
18	Pengembangan ternak secara kolektif.	4,8
19	Pembangunan dan pengelolaan tambahan peralatan di sektor pertanian.	3,6
20	Pengembangan teknologi tepat guna dalam menunjang pembangunan Desa.	6,1

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Pemanfaatan Dana Desa di Desa Tamantirto yang mengalokasikan pembangunan fasilitas dan infrastruktur bersifat fisik anggarannya kebanyakan digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan desa serta pengembangan sarana dan prasarana produksi desa. Karena Desa Tamantirto secara demografi terletak dipinggiran kota, maka untuk kebutuhan di sektor pertanian tidak terlalu banyak jumlah anggarannya. Hal tersebut dapat dilihat dari pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa, serta tambahan peralatan disektor pertanian.

Selain fasilitas dan infrastruktur yang bersifat fisik, pemerintah desa juga mengalokasikan anggaran tersebut untuk pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM serta sebagai wadah bagi masyarakat untuk bersosialisasi dan bekerjasama sesuai dengan kelompoknya masing-masing.

Tabel 5.2.
Rencana Program Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh
Pemerintah Desa Tamantirto Tahun 2017

No	Uraian	Jumlah%
1	Peningkatan kualitas SDM dalam proses perencanaan desa.	20,63
2	Mendukung kegiatan ekonomi yang dikembangkan oleh BUMDes atau kelompok usaha masyarakat desa.	14,35
3	Peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.	20,62
4	Penyelenggaraan gerakan hidup bersih dan sehat	21,97
5	Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat dalam pengelolaan hutan.	0
6	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui kelompok usaha ekonomi, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda dan kelompok lain sesuai dengan kondisi desa.	22,43

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan tabel 5.2. diatas, program Desa Tamantirto dalam pemberdayaan dan pembinaan masyarakat yaitu peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui kelompok usaha ekonomi, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda dan kelompok lain sesuai dengan kondisi desa sebesar 22,43%. Selanjutnya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan penyelenggaraan gerakan hidup sehat sebesar 21.97%.

Dalam peningkatan kualitas sumber daya masyarakat dalam membantu pembangunan desa sebesar 20,63% dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa yang telah dibentuk oleh Desa Tamantirto melalui organisasi dan atau komunitas sebesar 20,62%. Desa Tamantirto sendiri belum

mempunyai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga program dalam pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan disektor ekonomi hanya dilakukan oleh kelompok usaha masyarakat desa.

5.2 Efektivitas Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi dan

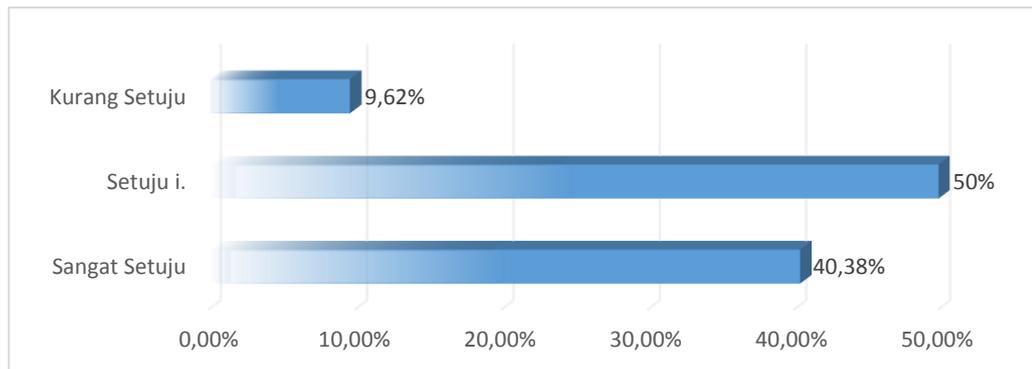
Infrastruktur Pedesaan

Dana Desa telah menjadi strategi yang diambil pemerintah pusat untuk membantu menjalankan pembangunan ekonomi Pedesaan yang lebih maju. Efektivitas pembangunan desa yang menggunakan Dana Desa dapat berhasil apabila tata kelola pembangunan didasari pada empat variable yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan transparansi.

Faktor pertama untuk mewujudkan efektivitas pemanfaatan anggaran dana desa adalah perencanaan. Bagaimana proses perencanaan pembangunan yang menggunakan dana desa sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Pemerintah Desa Tamantirto wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Dalam proses penyusunan perencanaan desa, Pemerintah Desa Tamantirto harus mengacu kepada perencanaan pembangunan di atasnya yaitu Kabupaten Bantul atau disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal itu merupakan syarat utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, tentunya dengan tidak keluar pada kewenangan yang di berikan kepada Desa.

Dalam penelitian ini, analisis pertama yang dilakukan tentang kelengkapan administrasi guna menunjang pembangunan ekonomi pedesaan.

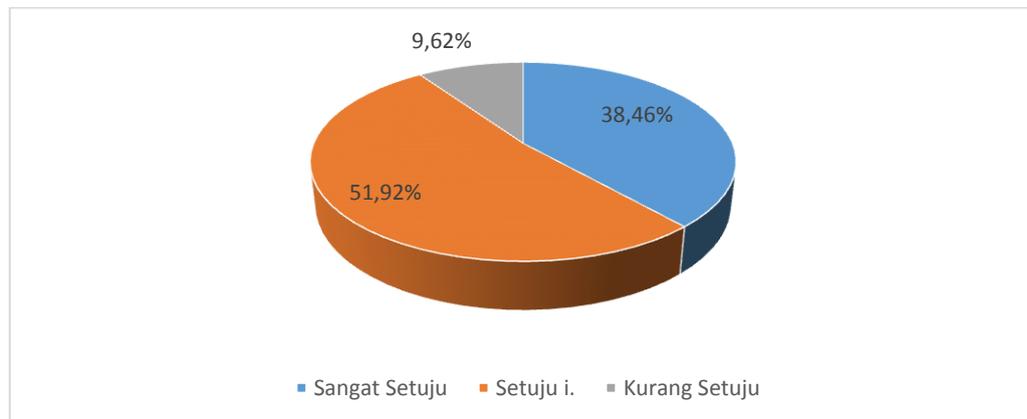
Pemerintah Desa Tamantirto harus menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan rancangan anggaran pendapatan belanja desa (RAPBDes) dengan memperhatikan potensi desa.



Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Gambar 5.3.
Penyusunan RPJMDes dan APBDes

Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa, Pemerintah Desa Tamantirto telah menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan memperhatikan potensi desa. Hal ini dapat dilihat pada gambar 5.3 diatas, terdapat sebanyak 40,38% responden yang menyatakan sangat setuju dan sebanyak 50% responden menyatakan setuju. Hanya terdapat 9,62% masyarakat yang kurang setuju dalam kinerja Pemerintah Desa Tamantirto dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa.



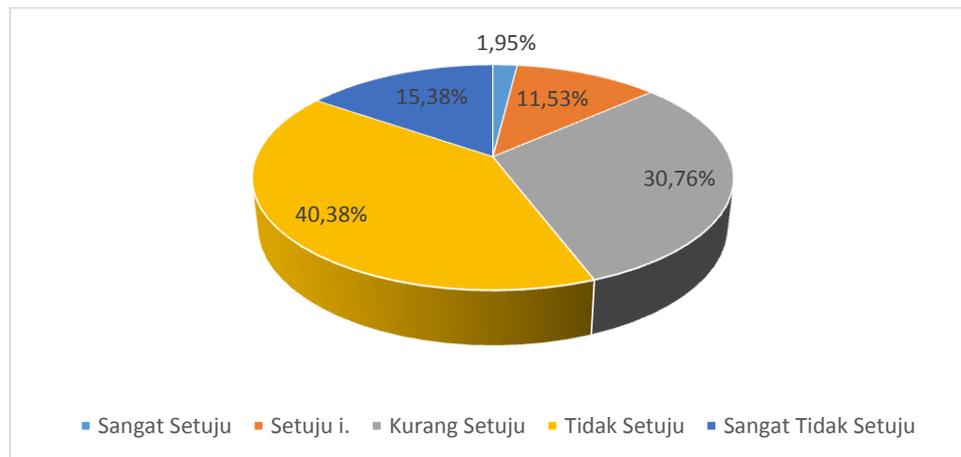
Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Gambar 5.4.

Skala Prioritas Program dalam Perencanaan Pembangunan

Dalam proses perencanaan pembangunan ekonomi desa, pemerintah desa harus menetapkan skala prioritas program dan kegiatan yang akan dibiayai menggunakan Dana Desa. Melihat gambar 5.4. diatas menunjukkan bahwa sebanyak 38% menyatakan setuju dalam penyusunan skala prioritas perencanaan pembangunan dan 52,15% yang menyatakan sangat setuju. Disisi lain masih terdapat persepsi masyarakat sebesar 9.85% yang mengatakan dalam perencanaan pembangunan desa tidak melihat skla prioritas program dalam pembangunan ekonomi desa. Dengan melakukan penyusunan skala prioritas dapat mengetahui prioritas utama dalam melaksanakan pembangunan desa.

Dana Desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat diharapkan mampu mendukung pemerintah desa agar lebih produktif dan mandiri dalam sektor ekonomi. Salah satunya mendorong untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).



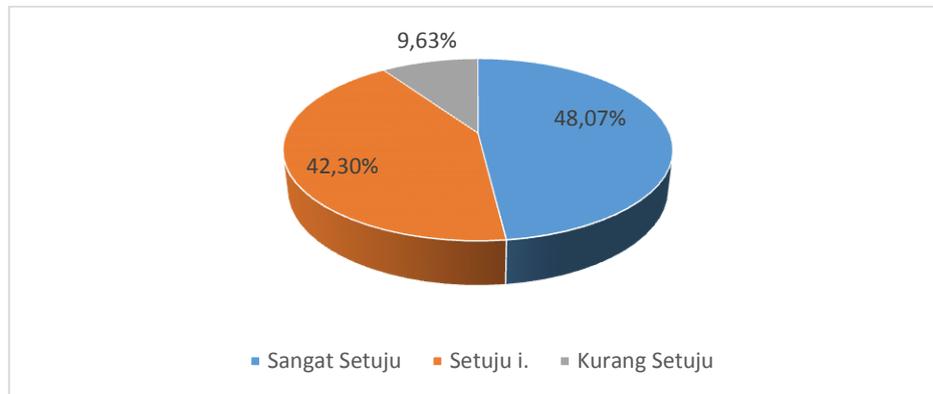
Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Gambar 5.5.
Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Temuan dilapangan saat observasi, Desa Tamantirto saat ini belum memiliki BUMDes yang dapat meningkatkan kemandirian pada sektor ekonomi. Hal ini juga diperkuat dari persepsi masyarakat melalui gambar 5.5. diatas yang memberikan kesimpulan mayoritas masyarakat menyatakan Pemerintah Desa Tamantirto belum mampu mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Terdapat sebanyak 30,76% responden menyatakan kurang setuju, sebanyak 40,38% menyatakan tidak setuju dan sebanyak 15,38% responden menyatakan sangat kurang setuju. Sisanya mengatakan setuju jika pemerintah desa telah mendirikan BUMDes. Hal ini terjadi akibat ketidak-tahuan masyarakat serta kurang aktif dalam keterlibatannya pada proses pembangunan desa.

Keterlibatan masyarakat juga penting guna mendukung proses pembangunan desa. Pemerintah Desa Tamantirto harus melibatkan masyarakat secara menyeluruh dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa. Dalam

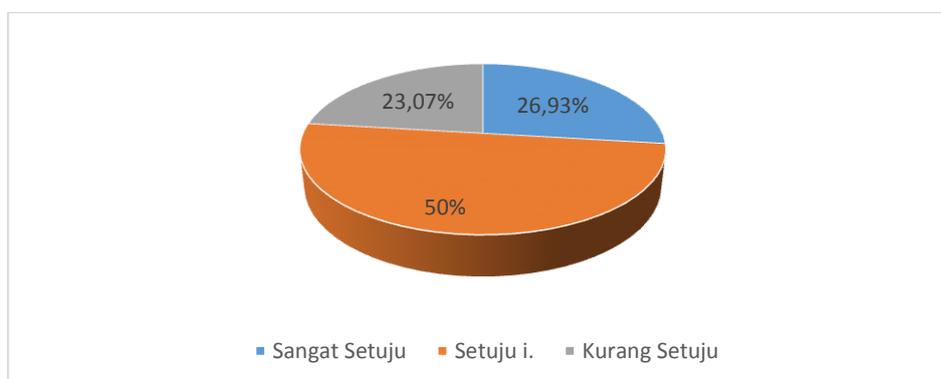
penyusunan rencana pembangunan, meskipun merupakan tugas pemerintah desa, namun sangat lebih efektif jika seluruh masyarakat turut terlibat di dalamnya.



Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Gambar 5.6.
Keterlibatan Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa

Berdasarkan gambar 5.6. diatas, terdapat sebanyak 48,07% responden menyatakan sangat setuju bahwa masyarakat sudah dilibatkan oleh pemerintah desa dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa dalam pembangunan desa, dan terdapat sebanyak 42,30% menyatakan setuju. Namun masih juga terdapat persepsi masyarakat yang kurang setuju jika masyarakat harus ikut terlibat kedalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa dalam pembangunan.

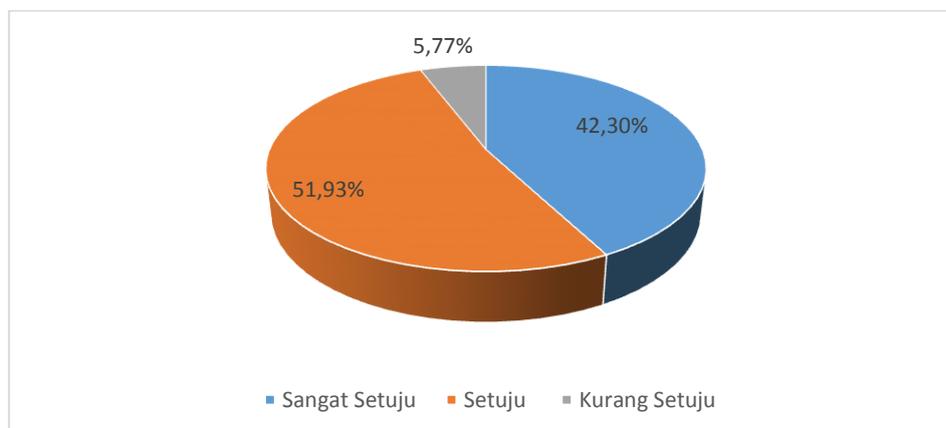


Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Gambar 5.7
Aparatur Desa Mampu Menyusun APBDes RPJMDes dan RKPDes

Dalam perencanaan pembangunan desa yang menggunakan anggaran dananya berasal dari Dana Desa, Pemerintah Desa Tamantirto telah menyusun RPJMDes yang mengacu pada RPJM Pemerintah Kabupaten Bantul. Hal ini dapat dilihat melalui gambar 5.7. diatas, bahwa terdapat sebanyak 50% responden menyatakan setuju dan 26,93% menyeterhadap kinerja aparatur desa yang telah mampu menyusun APBDesa, RPJMDes, dan RKPDes sesuai dengan RPJM Pemerintah Kabupaten Bantul. Disisi lain, masih terdapat persepsi masyarakat yang menyatakan bahwa program pembangunan desa yang menyatakan kurang setuju jika telah mengacu terhadap RPJM Kabupaten Bantul.

Faktor kedua untuk mewujudkan efektivitas pemanfaatan anggaran dana desa adalah ada tahap pelaksanaan. Bagaimana proses pelaksanaan program danvkegiatan pembangunan yang menggunakan dana desa sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Terlebih dalam tahap pelaksanaan, pemanfaatan dana desa dapat meningkatkan sumberdaya manusia lokal dan memaksimalkan potensi sumber daya alam lokal.

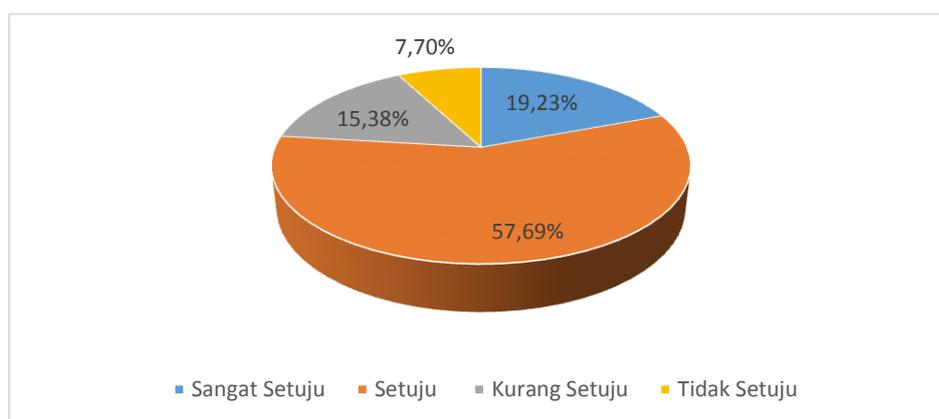


Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Gambar 5.8
Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berdasarkan gambar 5.8. diatas, terdapat sebanyak 42,30% responden yang menyatakan sangat setuju dan sebanyak 51,93% menyatakan setuju jika pemerintah desa telah memanfaatkan Dana Desa untuk program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang sudah direncanakan diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih produktif. Selain ersepsi masyarakat yang menyatakan setuju, masih ditemukan pernyataan masyarakat yang kurang setuju jika penggunaan Dana Desa telah dimanfaatkan untuk program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

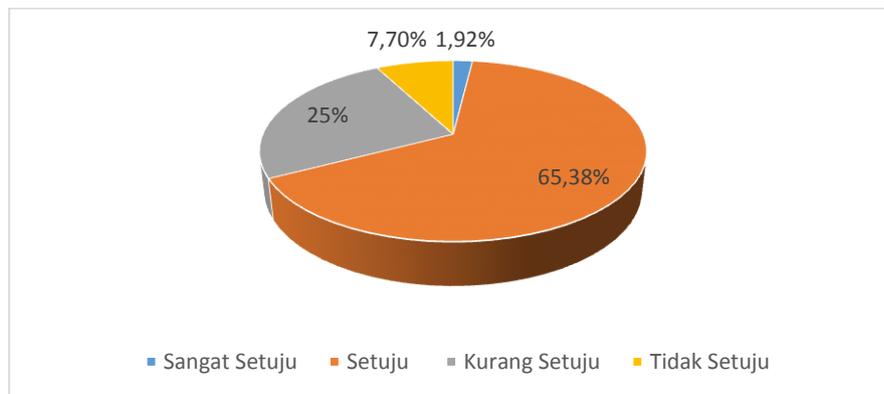
Selain program pemberdayaan masyarakat desa, Pemerintah Desa Tamantirto juga menetapkan skala prioritas program yang menggunakan Dana Desa untuk kegiatan pembinaan masyarakat desa. Kegiatan pembinaan masyarakat desa diharapkan mampu meningkatkan bakat individu disegala bidang seperti olahraga, kesenian, maupun kebudayaan.



Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Gambar 5.9
Pembinaan Masyarakat Desa

Berdasarkan gambar 5.9. diatas, terdapat sebanyak 57,69% responden yang menyatakan setuju dan sebanyak 19,23% responden menyatakan sangat setuju terhadap kinerja pemerintah desa yang telah memanfaatkan Dana Desa untuk kegiatan pembinaan masyarakat desa. Sedangkan terdapat 15,38% responden yang menyatakan kurang setuju dan sebanyak 7,7% responden menyatakan tidak setuju jika pemerintah desa telah memanfaatkan Dana Desa untuk program pembinaan masyarakat desa.

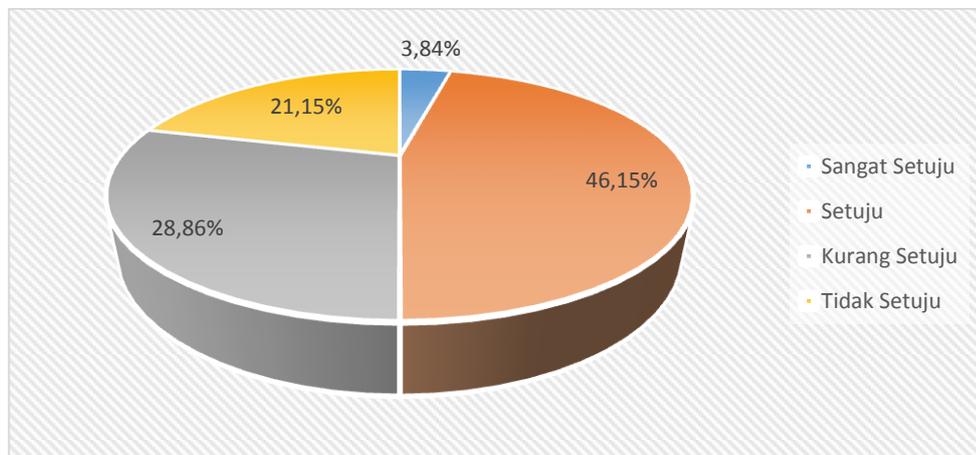


Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Gambar 5.10.
Pemanfaatan Sumber Daya Alam Lokal

Penggunaan Dana Desa dalam menunjang program pembangunan ekonomi desa harus memanfaatkan sumberdaya alam lokal atau potensi yang terdapat di desa. Pemerintah Desa Tamantirto sendiri telah menggunakan anggaran Dana Desa untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam lokal. Hal ini dapat dilihat melalui gambar 5.10. diatas, sebanyak 65,38% menyatakan setuju. Sedangkan terdapat persepsi masyarakat desa yang menyatakan kurang setuju dengan jumlah 25% dan 7,7% menyatakan tidak setuju jika pemerintah desa telah memanfaatkan sumber daya alam lokal di Desa Tamantirto.

Di samping itu, kemampuan aparaturnya juga perlu ditingkatkan melalui advokasi dan asistensi dari beberapa tenaga pendamping. Untuk itu, sangat dianjurkan dalam pelaksanaan program pembangunan ekonomi desa yang dibiayai dengan Dana Desa juga membutuhkan tenaga pendamping. Berikut merupakan persepsi masyarakat terkait dengan kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaannya.



Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Gambar 5.11.

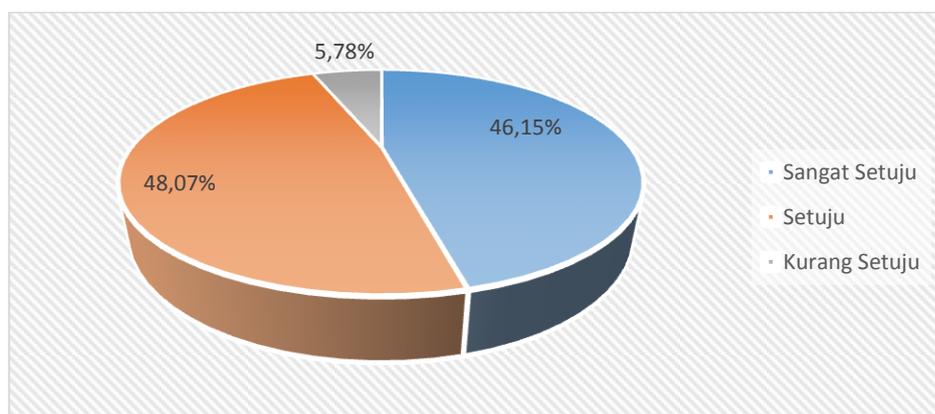
Pembangunan Sarana dan Prasarana Dengan Menggunakan SDM Lokal (Swakelola)

Selain pemanfaatan sumber daya alam lokal, Pemerintah Desa Tamantirto harus memaksimalkan penggunaan Sumber daya manusia dalam membantu pengkerjaan pembangunan desa. Hal ini dapat menciptakan kerja sama yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat serta dapat memberikan banyak inovasi baru yang baik dari masyarakat sehingga dalam pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif terhadap desa.

Jika melihat hasil penelitian melalui gambar 5.11. diatas, terdapat sebanyak 28,86% menyatakan kurang setuju dan 21,15% tidak setuju jika

masyarakat juga diikutsertakan dalam kegiatan pembangunan. Sedangkan kurang dari 50% total responden yang menyatakan setuju jika dalam pelaksanaan pembangunan desa telah mengajak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan.

Hal penting selanjutnya dalam proses pelaksanaan adalah tenaga pendamping. Tidak semua aparatur desa dapat memahami dan melaksanakan program pembangunan desa yang sesuai dengan perencanaan dan aturan yang telah ditetapkan. Dan tidak semua aparatur desa mampu mandiri secara menyeluruh sehingga diperlukannya tenaga pendamping guna memperlancar pembangunan desa. Berikut adalah persepsi masyarakat terkait dengan penggunaan tenaga pendamping untuk pembangunan desa.



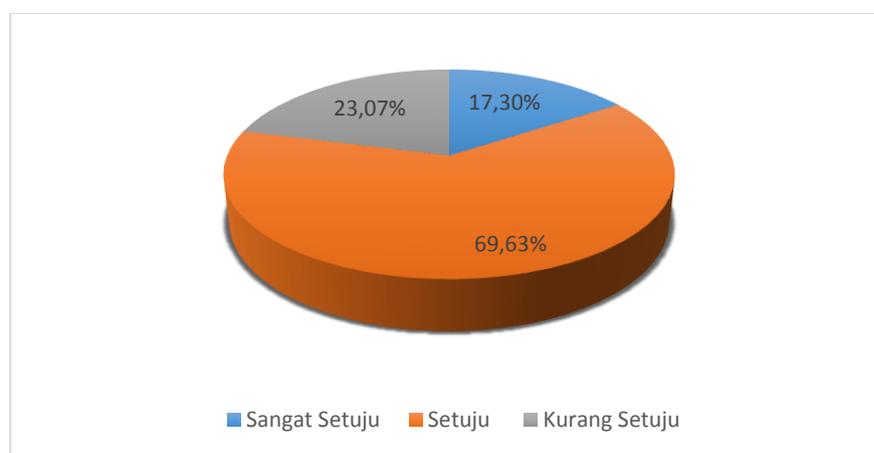
Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Gambar 5.12.
Pendamping Dalam Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan gambar diatas 5.12. dapat disimpulkan bahwa terdapat sebanyak 46,15% menyatakan sangat setuju dengan menggunakan tenaga pendamping dalam pemanfaatan dana desa hal ini dinyatakan agar dalam

pelaksanaan program dana desa mendapatkan perhatian khusus dari tenaga pendamping dan mengurangi ketidak-sesuaian dalam perencanaan dan pelaksanaan program dana desa. Selanjutnya sebanyak 48,07% menyatakan setuju dalam pelaksanaan pembangunan desa, aparat desa masih harus membutuhkan pendamping. Sedangkan sebanyak 5,78 yang kurang setuju untuk membutuhkan pendampingan pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan desa. Hal ini dinilai bahwa aparat desa telah mampu melaksanakan program pembangunan secara mandiri.

Faktor ketiga yang menjadi daya dukung efektivitas pemanfaatan dana desa dalam pembangunan ekonomi pedesaan adalah faktor evaluasi. Faktor evaluasi ini sangat lah penting dalam menilai keberhasilan atas pelaksanaan program pembangunan desa yang menggunakan anggaran dengan Dana Desa.



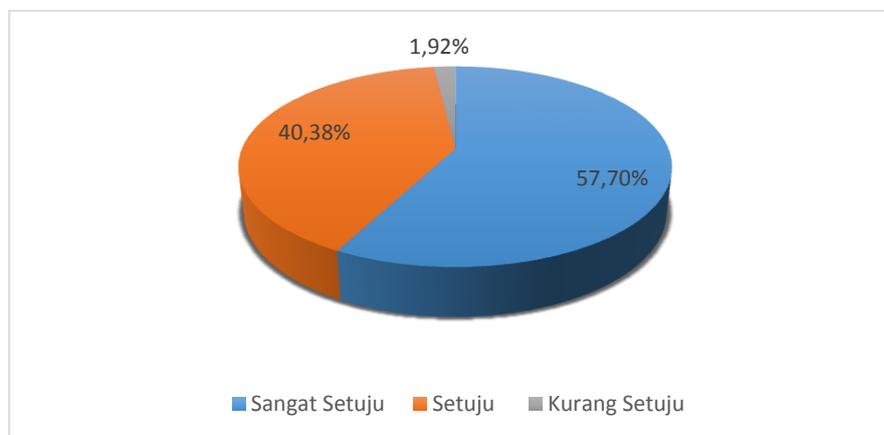
Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Gambar 5.13
Penggunaan Dana Desa Sesuai Dengan Yang Telah Direncanakan

Tahap ini akan mengevaluasi seluruh program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam proses pembangunan desa yang menggunakan Dana Desa. Berdasarkan gambar 5.13. diatas, terdapat sebanyak

69,63% responden yang menyatakan setuju dan sebanyak 17,30% responden menyatakan sangat setuju jika kinerja pemerintah desa telah menggunakan Dana Desa sesuai dengan yang telah direncanakan. Sedangkan terdapat sebanyak 23,07% responden yang menyatakan kinerja pemerintah desa belum mampu menggunakan Dana Desa sesuai dengan yang telah direncanakan. Hal ini diakibatkan oleh hasil pembangunan yang diharapkan masyarakat belum menjadi skala prioritas program dan kegiatan dari kinerja pemerintah desa.

Walaupun skala prioritas program dan kegiatan dari kinerja pemerintah desa yang dibiayai menggunakan Dana Desa, Pemerintah Desa Tamantirto mengharapkan seluruh program dan kegiatan yang telah direalisasikan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi desa.

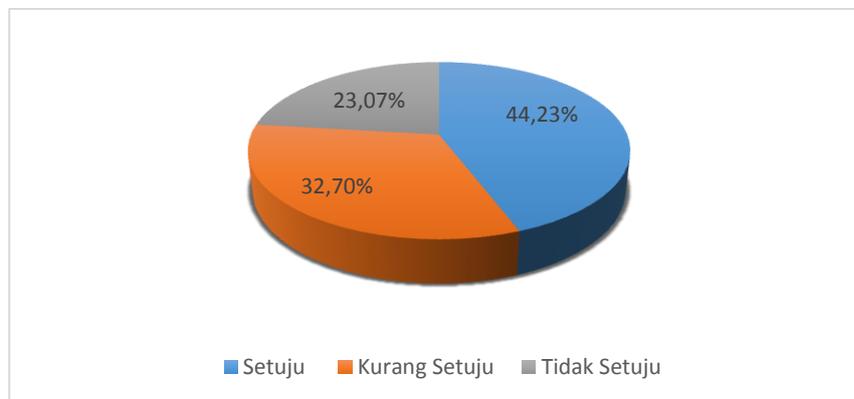


Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Gambar 5.14.
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Pedesaan

Setelah adanya kebijakan Dana Desa yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah desa dapat meningkatkan pembangunan ekonomi pedesaan. Hal ini dapat dilihat dari gambar 5.14 diatas. Mayoritas masyarakat

menyatakan bahwa Dana Desa telah mampu meningkatkan pembangunan ekonomi pedesaan. Terdapat sebanyak 57,7% responden yang menyatakan sangat setuju dan sebanyak 40,38% responden menyatakan setuju jika Dana Desa mampu memberikan dampak untuk meningkatkan proses pembangunan desa. Sedangkan terdapat 1,92% responden yang menyatakan pembangunan desa dengan menggunakan Dana Desa belum berpengaruh.

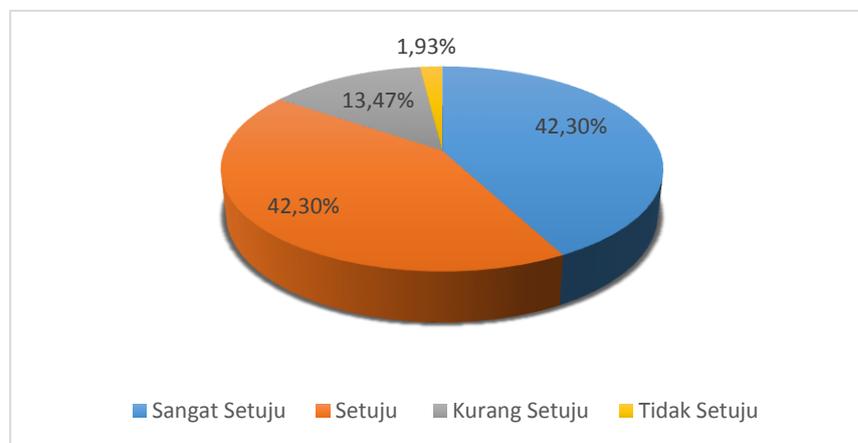


Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Gambar 5.15.
Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa

Meningkatkan pembangunan desa juga akan berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Hal ini dapat dilihat melalui gambar 5.15. diatas. Terdapat sebanyak 44,23% menyatakan sangat setuju dan sebanyak 32,7% menyatakan setuju jika Dana Desa telah mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Mayoritas masyarakat menilai kebijakan dana desa dapat berpengaruh terhadap pembangunan desa secara fisik maupun non fisik. Sedangkan masih terdapat penilaian masyarakat yang beranggapan Dana Desa belum berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Efektivitas Dana Desa dalam pemanfaatan program pembangunan desa juga menjadi hal yang di perhatikan dalam penggunaan dana desa. Pengelolaan anggaran dana desa yang yang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi desa juga menjadi daya dukung efektivitas penggunaan dana desa. Sehingga kesesuaian penggunaan dana desa dan target program pembangunan yang akan di capai dengan adanya dana desa. Berikut merupakan persepsi mengenai efektifitas dana desa dalam pembangunan ekonomi masyarakat desa secara umum.



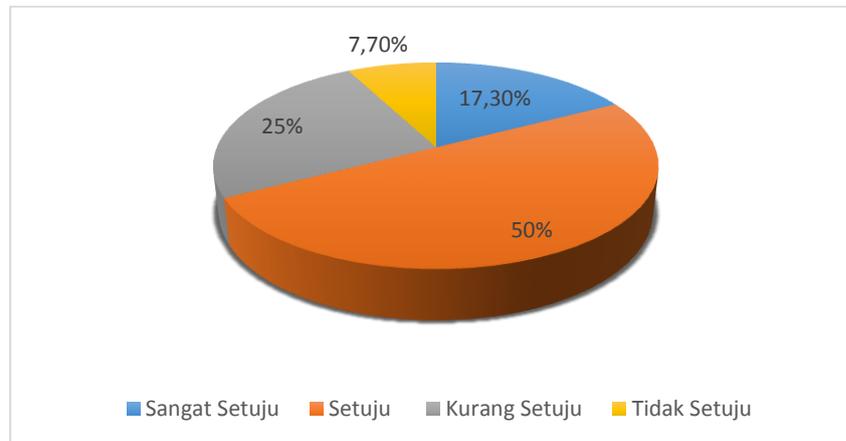
Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Gambar 5.16.

Memfaatkan Dana Desa Secara Efektif Untuk Pembangunan Desa

Berdasarkan gambar 5.16. diatas masyarakat memiliki persepsi bahwa pemanfaatan dana desa sudah efektif dalam pembangunan ekonomi desa. Hal ini dinyatakan jika terdapat sebanyak 42,30% menyatakan sangat setuju dan sebanyak 42,30% menyatakan setuju bahwa dana desa sudah efektif. Sedangkan sisanya menyatakan dana desa belum efektif dalam pembangunan ekonomi desa. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesiapan desa dalam menerima dan mengelola dana tersebut. Selain itu, lambannya penyaluran dana desa disebabkan oleh

birokrasi yang berbelit. Akibatnya, efektivitas dana desa dalam menggerakkan perekonomian desa belum optimal.



Sumber: Data Primer Diolah, 2019

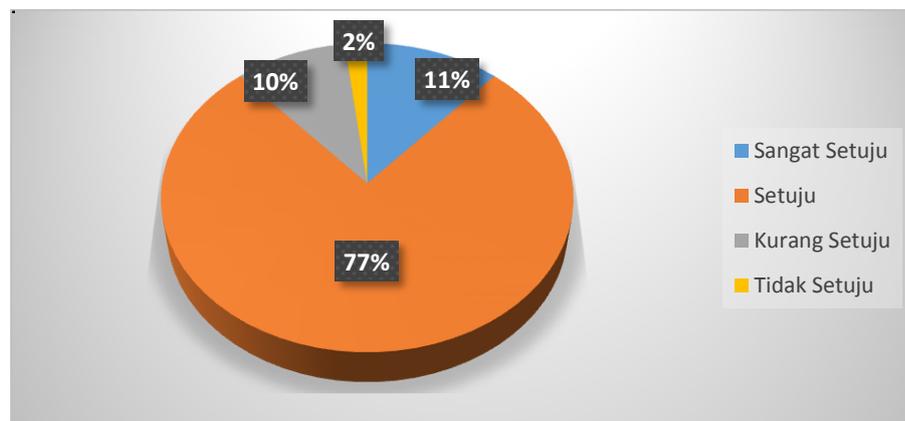
Gambar 5.17.
Menggunakan Dana Desa Secara Efisien

Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat jumlah penerimaan setiap desa juga berbeda-beda sesuai dengan kondisi setiap desa. sehingga pemerintahan desa diharapkan dapat memanfaatkan secara efisien untuk menunjang pembangunan yang telah direncanakan dapat diwujudkan dan diselesaikan.

Berdasarkan gambar 5.17. diatas, terdapat sebanyak 50% responden setuju dan 17,30% sangat setuju bahwa dana desa telah digunakan secara efisien. Namun terdapat responden yang justru berpendapat sebaliknya, yaitu 25%% menyatakan kurang setuju bahwa penggunaan dana desa dalam menunjang untuk pembangunan yang dilakukan telah efisien.

Faktor yang ke empat dan terakhir adalah transparansi. Pemerintahan desa yang transparan harus melibatkan masyarakat desa secara aktif dalam musyawarah perencanaan dan penyaluran anggaran untuk pembangunan desa.

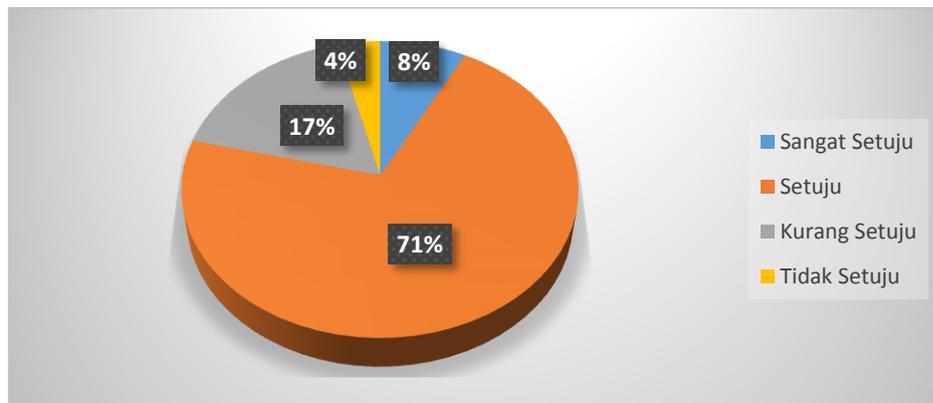
Pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel, maka anggaran yang diberikan pemerintah pusat dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong pembangunan ekonomi desa. Berikut persepsi masyarakat dalam menyampaikan informasi terkait transparansi pada penggunaan dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa sebagai pengelola dana.



Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Gambar 5.18.
Menyediakan Informasi Terkait Penggunaan Dana Desa

Guna mendukung terciptanya transparansi pengelolaan dana desa, Pemerintah Desa Tamantirto harus menyediakan papan informasi yang bersifat media cetak maupun media online. Menurut gambar diatas mayoritas responde menyatakan pemerintah desa telah menggunakan dana desa secara transparan. Hal ini dapat dilihat pada gambar 5.18. diatas, terdapat sebanyak 77% menyatakan setuju, dan 11% menyatakan sangat setuju. Sisanya terdapat 12% responden berpendapat jika belum dapat mengakses informasi tentang penggunaan Dana Desa tahun 2017.



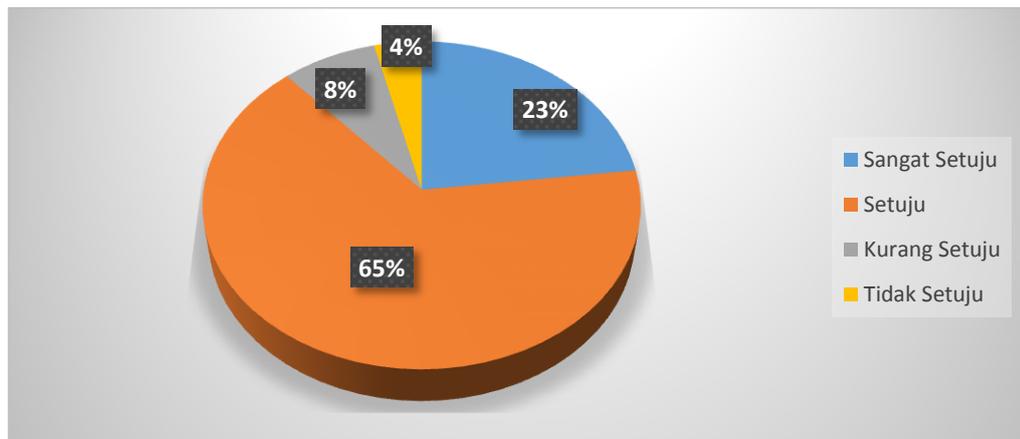
Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Gambar 5.19.

Masyarakat Dapat Mengakses Laporan Tentang Dana Desa

Berdasarkan pada gambar 5.19. diatas, dapat disimpulkan sebanyak 71% responden menyatakan setuju dan sebanyak 8% responden menyatakan sangat setuju. Dari hasil penelitian ini, mayoritas masyarakat mempunyai persepsi jika semua masyarakat dapat mengakses dokumen atau laporan tentang penggunaan Dana Desa tahun 2017 yang dimanfaatkan untuk pembangunan desa. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum mampu mengakses laporan penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan pembangunan desa. Hal ini dapat dilihat sebanyak 17% responden menyatakan kurang setuju dan 4% menyatakan tidak setuju.

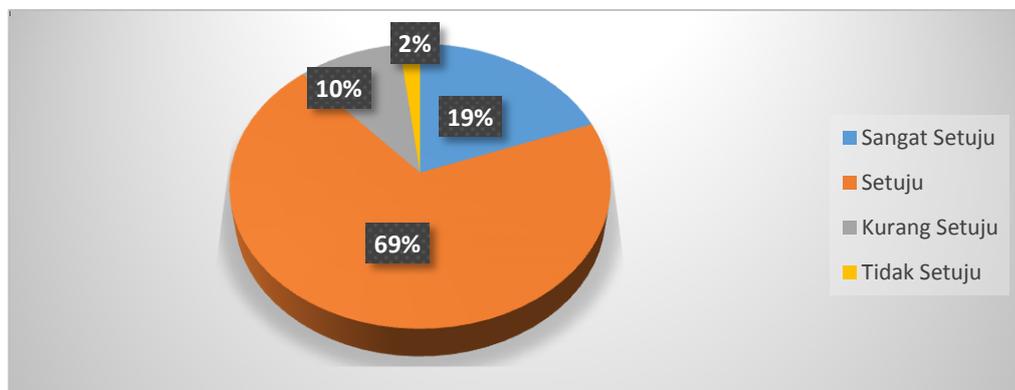
Semua program dan kegiatan yang menggunakan Dana Desa sebagai sumber pembiayaan, Pemerintah Desa Tamantirto harus menyusun laporan realisasi program dan kegiatan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban yang akan disampaikan kepada lembaga terkait, terutama kepada masyarakat.



Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Gambar 5.20.
Pemerintah Desa Telah Menyusun Laporan Realisasi Dana Desa

Dari gambar 5.20. diatas disimpulkan bahwa terdapat sebanyak 65% responden yang menyatakan setuju dan sebanyak 23% responden menyatakan sangat setuju jika Pemerintah Desa Tamantirto telah menyusun laporan realisasi program dan kegiatan pembangunan yang menggunakan Dana Desa tahun 2017. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum menerima laporan realisasi dari program dan kegiatan pembangunan desa. Hal ini dapat dilihat sebanyak 8% responden menyatakan kurang setuju dan 4% menyatakan tidak setuju.

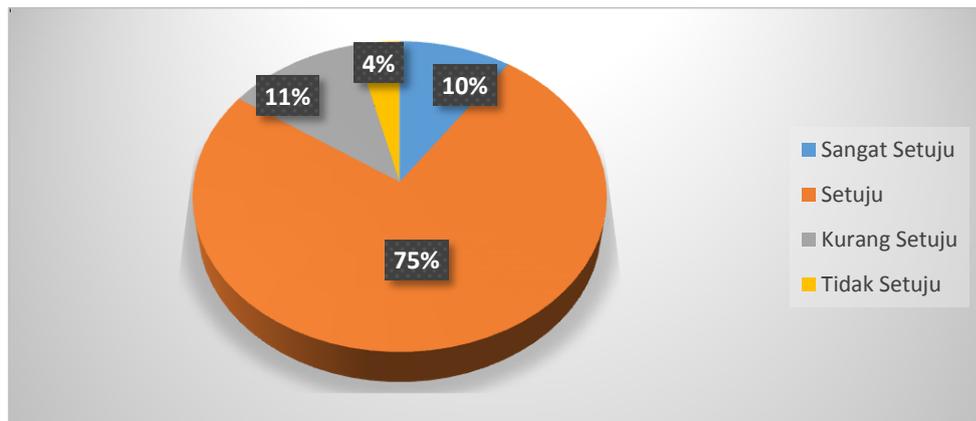


Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Gambar 5.21.
Menyampaikan Laporan Keuangan Desa Dalam Musyawarah Desa

Pada perencanaan program pembangunan desa, setelah semua terealisasi atau terlaksanakan, pemerintah desa wajib melaporkan laporan keuangan desa terutama keuangan Dana Desa yang disampaikan pada saat musyawarah desa. Berdasarkan gambar 5.21. diatas dapat diketahui sebanyak 69% responden menyatakan setuju dan 19% menyatakan sangat setuju jika pemerintah desa telah menyampaikan laporan keuangan Dana Desa dalam musyawarah desa. Kegiatan ini menjadi fasilitas masyarakat untuk melihat sejauhmana pembangunan desa yang menggunakan Dana Desa sebagai sumber pembiayaan. Disisi lain terdapat 10% responden menyatakan kurang setuju dan 2% responden menyatakan tidak setuju jika pemerintah desa telah melaporkan keuangan dana desa yang digunakan untuk pembangunan pada saat musyawarah desa.

Dalam mencapai kinerja pemerintah yang transparan dan akuntabilitas, Pemerintah Desa Tamantirto harus menyampaikan laporang keuangan desa, terutama tentang pemanfaatan Dana Desa yang diperoleh dari pemerintah pusat. Keterbukaan informasi desa akan memudahkan masyarakat dapat mengakses laporan pemanfaatan Dana Desa.



Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Gambar 5.22.

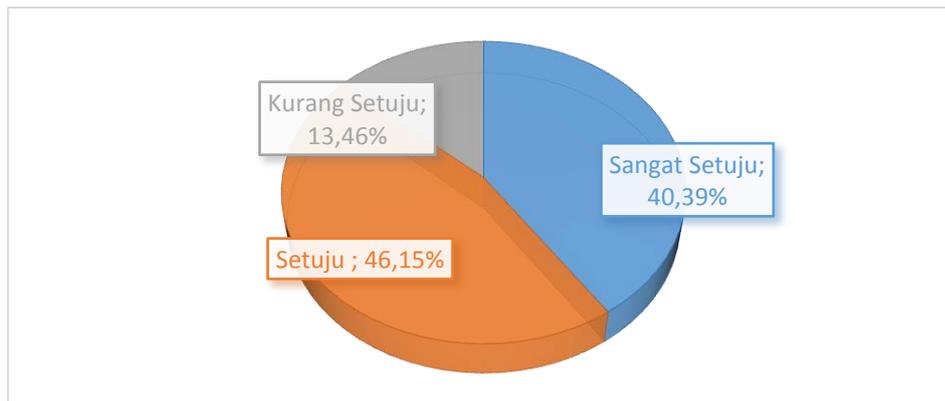
Penggunaan Dana Desa Telah Disampaikan Secara Transparan Kepada Masyarakat

Bedasarkan gambar 5.22. diatas, dapat diketahui sebanyak 10% responden menyatakan sangat setuju dan sebanyak 75% responden menyatakan setuju bahwa pemerintah desa telah menyampaikan penggunaan Dana Desa tahun 2017 kepada masyarakat secara transparan. Sedangkan masih terdapat sebagian dari masyarakat yang belum mengetahui laporan dari penggunaan Dana Desa. Hal ini dapat dilihat terdapat sebanyak 11% responden yang menyatakan kurang setuju dan 4% menyatakan tidak setuju.

Dana desa secara ideal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan menekan angka kemiskinan dan ketimpangan masyarakat di desa. Hal tersebut didasarkan pada manfaat dana desa yang digunakan untuk membangun sejumlah infrastruktur desa seperti jalan desa, jalan usaha tani, membangun usaha produksi desa, dan lainnya. Sehingga berdampak terhadap pembangunan ekonomi desa.

Hal tersebut tentu saja menjadi harapan seluruh elemen masyarakat desa meskipun tetap ada yang berpendapat bahwa dana desa belum cukup untuk

meningkatkan pembangunan ekonomi desa yang dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Berikut merupakan persepsi terkait dana desa telah meningkatkan pembangunan ekonomi desa.



Sumber: Data Primer Diolah, 2019

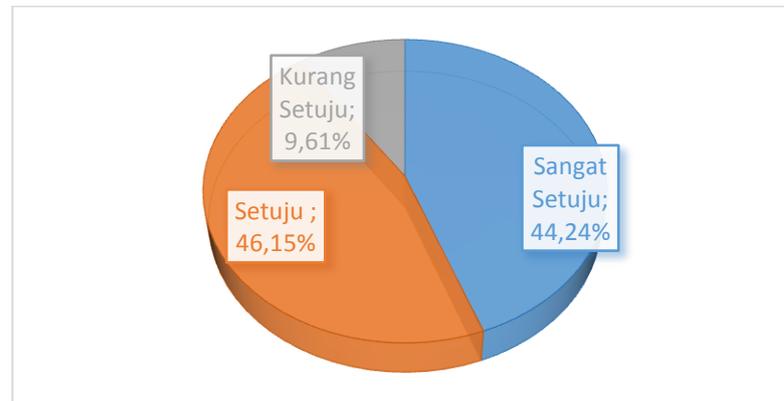
Gambar 5.23.

Dana Desa Telah Mampu Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Pedesaan

Tujuan Dana Desa diharapkan mampu meningkatkan pembangunan ekonomi desa. Program dan kegiatan yang menggunakan dana desa menjadikan kemudahan bagi setiap desa untuk mempermudah dalam melakukan pemerataan pembangunan. Menurut gambar 5.23. diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 40,39% responden menyatakan sangat setuju dan sebanyak 46,15% menyatakan setuju jika adanya Dana Desa telah membantu dalam proses pembangunan ekonomi desa. Masyarakat berpersepsi bahwa dana desa mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dengan adanya peningkatan dalam pembangunan.

Sejak pertama kali Dana Desa dialokasikan tahun 2015 dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan, baik itu pembangunan fisik maupun sumber daya manusia Indonesia seutuhnya. Pemerintah pusat ingin mewujudkan

kesejahteraan di desa sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial antar masyarakat di pedesaan.



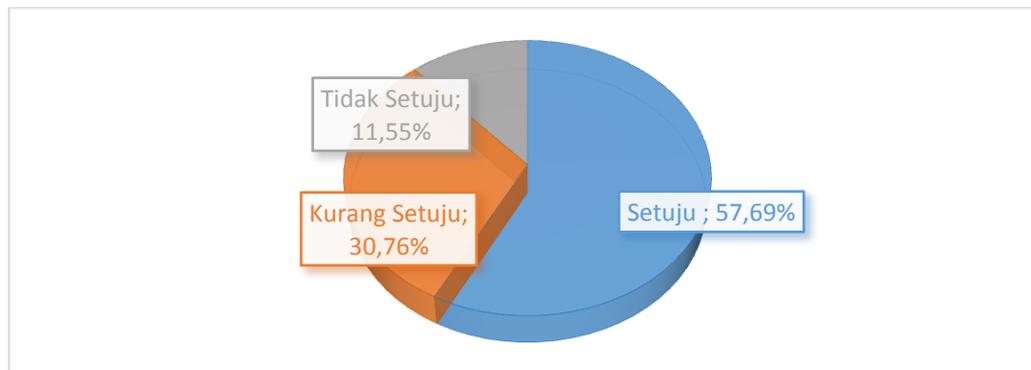
Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Gambar 5.24.

Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

Berdasarkan gambar 5.24. diatas, diketahui sebanyak 44,24% masyarakat yang menyatakan sangat setuju dan sebanyak 46,15% masyarakat menyatakan setuju jika Dana Desa yang digelontorkan oleh pemerintah telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan penambahan sarana prasarana fisik maupun non fisik dirasakan secara langsung manfaatnya guna menunjang pembangunan desa. Sedangkan masih terdapat 9,61% responden yang menyatakan kurang setuju jika Dana Desa telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh pembangunan yang dilaksanakan belum mampu dirasakan secara langsung.

Salah satu yang dapat menjadi tolak ukur untuk tingkat ekonomi adalah perubahan tingkat kemiskinan masyarakat. Dimana jika jumlah kemiskinan mampu mengalami penurunan maka dana desa dapat memberikan dampak yang baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.



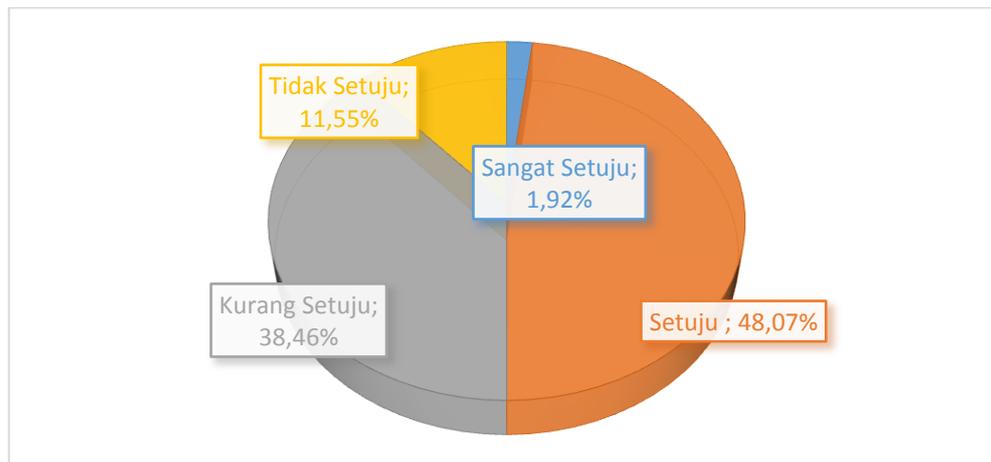
Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Gambar 5.25.

Dana Desa telah mampu mengurangi jumlah kemiskinan

Berdasarkan hasil penelitian ini, sesuai pada gambar 5.25. diatas terdapat sebanyak 57% responden menilai setuju jika Dana Desa telah memberikan dampak untuk mengurangi jumlah kemiskinan di desa melalui beberapa program yang telah terealisasi. Sedangkan terdapat sebanyak 30% responden menyatakan kurang setuju dan sebanyak 11,55% menyatakan tidak setuju bahwa program pembangunan desa yang dibiayai menggunakan Dana Desa tahun 2017 telah mengurangi jumlah kemiskinan di Desa Tamantirto.

Tujuan berikutnya dengan adanya kebijakan pengalokasian Dana Desa yang langsung dari pemerintah pusat adalah mengatasi ketimpangan yang ada dalam masyarakat setiap tahunnya. Berikut persepsi dana desa mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat.

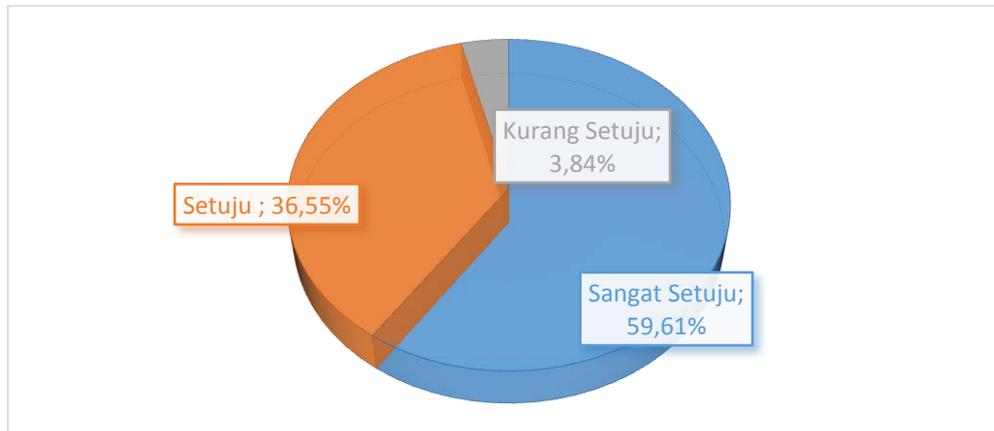


Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Gambar 5.26.

Dana Desa meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat

Sesuai dengan tujuan dari kebijakan Dana Desa, pengalokasian dana tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap pendapatan masyarakat kedepannya. Dengan berbagai program dari pemerintah desa yang menggunakan Dana Desa sebagai sumber keuangan, diharapkan program-program pembangunan tersebut juga berimbas terhadap pemerataan pendapatan masyarakat. Berdasarkan gambar 5.26. diatas, diketahui sebanyak 48,07% menyatakan setuju bahwa pengalokasian dana desa telah berakibat meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat. Sedangkan terdapat juga persepsi masyarakat yang menyatakan kurang setuju sebanyak 38,46% dan tidak setuju sebanyak 11,55%. Mereka berpendapat bahwa dana desa belum mampu memberikan pemerataan pendapatan masyarakat.



Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Gambar 5.27

Dana Desa telah menambah jumlah sarana dan prasarana desa

Berdasarkan gambar 5.27. di atas menunjukkan sebesar 59,61% responden menyatakan sangat setuju jika pemanfaatan Dana Desa pada tahun 2017 telah memberikan penambahan sarana dan prasarana pedesaan seperti pembangunan drainase desa, kelompok UKM desa, Perbaikan pos kamling serta beberapa perbaikan infrastruktur jalan desa. Dan terdapat sebanyak 36,55% menunjukkan setuju bahwa dana desa telah memberikan penambahan sarana dan prasarana desa secara nyata. Disisi lain masih ada yang menyatakan kurang setuju yaitu sebesar 3,84%.

5.3 Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang mengacu kepada tingkat kesesuaian antara data yang dikumpulkan dan data sebenarnya dalam sumber data. Tujuan melakukan uji validitas untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya. Kriteria dalam menentukan validitas kuesioner adalah:

- a. Jika r hitung $>$ r tabel maka instrumen dinyatakan valid.
- b. Jika r hitung \leq r tabel maka instrumen dinyatakan tidak valid.

Tabel 5.3.

Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Perencanaan	1	0,790	0,2706	Valid
	2	0,749	0,2706	Valid
	3	0,739	0,2706	Valid
	4	0,734	0,2706	Valid
	5	0,846	0,2706	Valid
Pelaksanaan	1	0,577	0,2706	Valid
	2	0,827	0,2706	Valid
	3	0,733	0,2706	Valid
	4	0,875	0,2706	Valid
	5	0,660	0,2706	Valid
Evaluasi	1	0,774	0,2706	Valid
	2	0,694	0,2706	Valid

Lanjutan Tabel 5.3.

	3	0,798	0,2706	Valid
	4	0,863	0,2706	Valid
	5	0,872	0,2706	Valid
Transparansi	1	0,754	0,2706	Valid
	2	0,882	0,2706	Valid
	3	0,819	0,2706	Valid
	4	0,644	0,2706	Valid
	5	0,764	0,2706	Valid
Efektifitas Pemanfaatan	1	0,452	0,2706	Valid
	2	0,527	0,2706	Valid
	3	0,284	0,2706	Valid
	4	0,430	0,2706	Valid
	5	1	0,2706	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Uji validitas ini menggunakan 56 sampel yang memenuhi kriteria sebagai responden. Reponden dari sampel ini meliputi Kepala Dusun dan Ketua Rumah Tangga (RT) selaku kriteria masyarakat yang merasakan kinerja pemerintah desa. Untuk melihat validitas setiap subindikator yang akan di uji dan untuk menghitung $df = N-2$ maka $df = 54$ dan memiliki nilai r-tabel sebesar 0.361. Berdasarkan hasil table diatas dapat diketahui bahwa hasil r hitung setiap sub indikator dalam kuisisioner lebih besar dari r tabel (0,361). Demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan setiap variabel perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, transparansi dan efektivitas pemanfaatan adalah valid.

5.4 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas merupakan tingkat kepercayaan hasil dari suatu pengukuran. Pengukuran yang memiliki nilai reliabilitas tinggi dapat memberikan kesimpulan pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya. Reliabilitas juga menjadi salah satu ciri atau karakter utama instrumen pengukuran yang baik.

Dalam uji reliabilitas ini dimuat hipotesis pertama ialah jika nilai koefisien reliabilitas $>$ t-tabel maka instrumen dinyatakan reliabel atau dapat dipercaya. Pengujian dengan $\alpha = 5 \%$. Kemudian hipotesis kedua ialah jika nilai koefisien reliabilitas \leq t-table maka instrumen dinyatakan tidak reliabel atau tidak dapat dipercaya. Pengujian juga dengan $\alpha = 5 \%$.

Tabel 5.4.
Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Perencanaan (X1)	0,804	Reliabel
2	Pelaksanaan (X2)	0,795	Reliabel
3	Evaluasi (X3)	0,860	Reliabel
4	Transparansi (X4)	0,828	Reliabel
5	Efektifitas Pemanfaatan (Y)	0,829	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Dari hasil uji reliabilitas pada tabel diatas terhadap tiap – tiap variabel perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, transparansi dan efektivitas pemanfaatan

dapat disimpulkan keseluruhannya reliabel dan dapat dipercaya karena memenuhi nilai cronbach's alpha lebih dari 0,5.

5.5 Analisis Kesenjangan

Gap Analysis diartikan sebagai perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau yang diharapkan. Analisis ini juga dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan apa saja yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan atau mencapai kinerja yang diharapkan pada masa datang melalui hasil nilai kesenjangan disetiap indikator variabel. Lebih dari itu analisis ini juga memperkirakan perencanaan waktu, biaya, dan sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan yang diharapkan.

Tabel 5.5

Analisis Kesenjangan Efektivitas Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi di Desa Tamantirto Tahun 2017

No	Parameter Perencanaan Dana Desa	Perceived service	Expected service	Selisih
1	Pemerintah desa telah menyusun RPJMDes dan APBDes.	4,3333	4,3036	0,0297
2	Pemerintah desa telah menetapkan skala prioritas program dalam perencanaan pembangunan.	3,8667	4,4286	-0,5619
3	Pemerintah desa telah menyusun Anggaran mendirikan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes).	2,6667	2,8036	-0,1369
4	Pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa.	4,1333	4,3929	-0,2596

Lanjutan Tabel 5.5

5	Aparatur Desa mampu menyusun APBDes, RPJMDes, dan RKPDes yang menjadi acuan penyaluran Dana Desa.	4,1333	4,0179	0,1154
6	Memanfaatkan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa.	4,4000	4,3750	0,0250
7	Memanfaatkan Dana Desa untuk kegiatan pembinaan masyarakat desa.	3,7333	3,8036	-0,0703
8	Menggunakan Dana Desa untuk pemanfaatan sumber daya alam lokal	3,6000	3,5893	0,0107
9	Pembangunan sarana dan prasarana dengan menggunakan SDM lokal (Swakelola).	3,2000	3,2857	-0,0857
10	Pemerintah desa perlu pendamping dalam pengelolaan Dana Desa.	4,5333	4,3929	0,1404
11	Menggunakan Dana Desa sesuai dengan yang telah direncanakan.	4,0000	3,9286	0,0714
12	Dana Desa mampu meningkatkan pembangunan ekonomi pedesaan.	4,5625	4,5536	0,0089
13	Dana Desa mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.	3,6250	3,2143	0,4107
14	Memanfaatkan Dana Desa secara efektif untuk pembangunan desa.	4,5000	4,2321	0,2679
15	Pemerintah Desa telah menggunakan Dana Desa secara efisien.	4,0000	3,7500	0,2500
16	Pemerintah Desa menyediakan informasi terkait penggunaan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa.	4,6875	3,9821	0,7054
17	Masyarakat dapat mengakses dokumen/ laporan tentang Dana Desa.	4,3750	3,7857	0,5893

--	--	--	--	--

Lanjutan Tabel 5.5

18	Pemerintah Desa telah menyusun laporan realisasi Dana Desa dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.	3,8750	4,0357	-0,1607
19	Pemerintah Desa menyampaikan laporan keuangan desa dalam musyawarah desa.	3,8750	4,0357	-0,1607
20	Penggunaan Dana Desa telah disampaikan secara transparan kepada masyarakat desa.	4,7500	3,8750	0,8750
21	Dana Desa mampu meningkatkan pembangunan ekonomi pedesaan.	4,6000	4,2500	0,3500
22	Pemerintah Desa telah menggunakan Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.	4,2000	4,3750	-0,1750
23	Dana Desa telah mampu mengurangi jumlah kemiskinan di pedesaan.	3,7333	3,4464	0,2869
24	Pemerintah Desa telah menggunakan Dana Desa untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat desa.	3,8000	3,4107	0,3893
25	Penggunaan Dana Desa telah menambah jumlah sarana dan prasarana desa secara nyata.	4,6000	4,5893	0,0107
	Rata-Rata	4,0713	3,9542	0,1171
	t-independent sample test (Sig. (2-tailed))	0,393		

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Dalam analisis kesenjangan ini dapat dimuat dengan hipotesis apabila nilai rata-rata analisis potensi dan kebutuhan desa nilai kesenjangan lebih dari atau sama dengan angka nol (0) maka implementasi analisis potensi dan kebutuhan

desa berhasil sesuai dengan rencana dan mampu mengatasi permasalahan yang ada didalam pembangunan ekonomi desa. Sedangkan apabila nilai rata-rata kesenjangan kurang dari angka nol (0) maka implementasi kebijakan tersebut tidak mampu mengatasi permasalahan yang ada dalam pembangunan desa.

Nilai layanan kinerja yang diterima (*preceived service*) merupakan jumlah keseluruhan nilai rata-rata yang didapatkan dari persepsi yang diberikan oleh Pemerintah Desa Tamantirto yaitu dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan beberapa aparatur desa. Sedangkan nilai layanan kinerja yang diharapkan (*expected service*) merupakan nilai rata-rata yang diperoleh dari persepsi yang diberikan oleh masyarakat yaitu dari Kepala Dusun dan Ketua Rumah Tangga (RT). Dalam Uji analisis kesenjangan terhadap kinerja dari pemanfaatan dana desa untuk pembangunan ekonomi desa terdapat 5 variabel yang diukur yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, transparansi, dan efektivitas pemanfaatan dana desa.

Variabel pertama yang diukur ialah variabel perencanaan. Variabel ini mempunyai 5 indikator pertanyaan yaitu penyusunan dokumen perencanaan, analisis potensi dan kebutuhan desa, mendirikan BUMDes, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan kemampuan penyusunan RPJMDes, RAPBDes, dan RKPDes yang sesuai dengan RPJM Kabupaten Bantul.

Hasil Analisis ini menunjukkan bahwa indikator analisis potensi dan kebutuhan desa, mendirikan BUMDes, dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan menghasilkan nilai negative. Sedangkan indikator penyusunan

dokumen perencanaan dan kemampuan penyusunan RPJMDes, RAPBDes, dan RKPDes sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bantul menghasilkan nilai positive.

Dimana hasil analisis indikator analisis potensi memiliki selisih $-0,5619$. Hasil analisis indikator pendirian BUMDes memiliki selisih $-0,1369$, dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan memiliki selisih nilai kesenjangan rata-ratanya sebesar $-0,2596$. Sedangkan indikator penyusunan dokumen perencanaan memiliki selisih nilai kesenjangan rata-rata sebesar $0,0297$ dan kemampuan penyusunan RPJMDes, RAPBDes, dan RKPDes sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bantul memiliki selisih nilai kesenjangan rata-ratanya sebesar $0,1154$.

Variabel kedua yang dianalisis adalah proses pelaksanaan pemanfaatan dana desa dalam pembangunan ekonomi desa. Variabel ini mempunyai lima indikator yang meliputi pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam lokal, pemanfaatan sumber daya lokal (Swakelola), dan Pendampingan pemerintah desa agar Dana Desa dapat dikelola secara efektif dan efisien.

Hasil analisis dari nilai rata-rata kesenjangan variabel pelaksanaan menunjukkan bahwa terdapat tiga indikator yang bersifat positive dan dua indikator yang bernilai negative. Pada indikator pemberdayaan masyarakat memiliki selisih rata-rata kesenjangan sebesar $0,0250$, Indikator pemanfaatan sumber daya alam lokal memiliki nilai rata-rata kesenjangan sebesar $0,0107$. Dan indikator yang mempunyai nilai positive lainnya ialah pendampingan aparatur desa dalam pemanfaatan danadesa yang memiliki nilai rata-rata kesenjangan dengan selisih

0,1404. Sedangkan indikator yang bersifat negative ialah pembinaan masyarakat yang memiliki selisih -0,0703 dan penggunaan sumberdaya lokal (swakelola) dengan selisih nilai rata-rata kesenjangan sebesar -0,0857. Variabel pelaksanaan ini diperlukan beberapa perbaikan dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa.

Variabel ketiga yang akan diukur ialah tahap evaluasi program dan kegiatan dalam pemanfaatan dana desa untuk pembangunan desa. Variabel ini terdapat lihat indikator yang menilai evaluasi kinerja pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa. indikator tersebut ialah kesesuai terhadap rencana, meningkatkan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, efektifitas, dan efisiensi peafaatan dana desa dalam pembangunan ekonomi desa.

Hasil analisis pada variabel ini, ditemukan keseluruhan indikator mempunyai nilai positive atau lebih dari nol. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap evaluasi dari realisasi program dan kegiatan pembangunan desa yang menggunakan dana desa sudah sesuai dengan harapan masyarakat desa. Walaupun keseluruhan indikator bernilai positive, namun masih ditemukan salah satu indikator yang mempunyai nilai rata-rata kesenjangan yang cukup baik. Hal ini terlihat pada indikator meningkatkan pembangunan ekonomi desa yang masih memiliki nilai rata-rata kesenjangan sebanyak 4,5625.

Variabel keempat yang dianalisis adalah variabel transparansi. Variabel ini untuk menilai keterbukaan informasi pemanfaatan dana desa secara transparan. Pemerintah Desa Tamantirto sebenarnya telah berupaya memerikan informasi tentang emanfaatan dan pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan ekonomi desa. Hanya saja perangkat-perangkat pendukung yang belum maksimal sehingga

belum mampu menyampaikan pemanfaatan Dana Desa kepada masyarakat secara baik.

Hasil analisis nilai rata-rata kesenjangan pada setiap indikator variabel transparansi menunjukkan kinerja pada penggunaan Dana Desa belum disampaikan secara transparan kepada masyarakat memiliki nilai rata-rata kesenjangan yang paling paling, yaitu sebesar 0,8750. Hal ini menunjukkan bahwa pada indikator tersebut sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Variabel terakhir yang dianalisis adalah efektifitas pemanfaatan Dana Desa Dalam pembangunan ekonomi desa. Variabel ini akan menganalisis perubahan kondisi fisik maupun non-fisik yang terjadi di desa setelah adanya program an kegiatan pembangunan ekonomi desa yang menggunakan Dana Desa sebagai sumber pendanaan. Pada variabel ini terdapat lima indikator yang akan diukur yaitu meningkatkan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi jumlah kemiskinan, pemeratakan pendapatan masyarakat, dan menambah jumlah sarana dan prasarana di desa.

Hasil analisis ini menunjukkan indikator pembangunan desa, mengurangi jumlah kemiskinan, pemerataan pendapatan masyarakat, dan penambahan sarana dan prasarana desa secara nyata memiliki nilai rata-rata yang positive. Hal ini menandakan jika pemanfaatan dana desa telah mampu menunjang pembangunan ekonomi desa. Tetapi dalam indikator meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum mampu memberikan dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah Desa Tamantirto harus bisa lebih baik lagi dalam pemanfaatan

dan pengalokasian dana desa agar dapat memberikan dampak yang nyata untuk proses pembangunan ekonomi desa demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Tabel 5.6**Uji T-**

	t-test for Equality of Means
Rata-rata	Sig. (2-tailed)
Equal variances assumed	.393
Equal variances not assumed	.393

Independent

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Secara keseluruhan penelitian ini melakukan analisis kesenjangan kebijakan melalui persepsi antara pemerintah desa selaku pemangku kebijakan dan masyarakat selaku penerima program dan kegiatan pembangunan desa. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan uji t-independent untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Dari penelitian ini diperoleh hasil Sig. (2-tailed) sebesar 0,393. Sesuai dengan kaidahnya jika nilai Sig. (2-tailed) < 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil layanan kinerja yang diharapkan (expected service) dengan layanan kinerja yang diterima (preceived service) dari pemanfaatan Dana Desa dalam menunjang pembangunan desa. Selanjutnya jika nilai Sig. (2-tailed) > 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil layanan kinerja yang diharapkan (expected service) dengan layanan kinerja yang diterima (preceived service) dari pemanfaatan Dana Desa dalam menunjang pembangunan desa. Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan yang tidak terlalu signifikan pada persepsi atas kinerja yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat atas efektivitas dana desa dalam menunjang pembangunan ekonomi Desa Tamantirto tahun 2017.